

**STATUS DAN FUNGSI TANAH BENGKOK DI KECAMATAN
SELO KABUPATEN BOYOLALI**

Tesis S2

**Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP**



Oleh :

**JUNANTA AGUNG NUGRAHA,SH
B4B 001147**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

**STATUS DAN FUNGSI TANAH BENGKOK DI KECAMATAN
SELO KABUPATEN BOYOLALI**

TESIS S2

**Disusun Oleh :
Junianta Agung Nugraha,SH
B4B 001147**

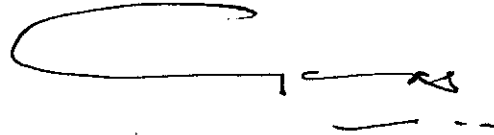
Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 21 Oktober 2003
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Telah disetujui
Oleh

Pembimbing Utama

Ketua Program
Magister Kenotariatan


Hj. Endang Sri Santi, SH., MH.
NIP. 130 929 452


Prof. I.G.N. Sugangga,SH
Nip. 130 359 063

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft. 2283/T/inst/04
Tgl. 12 Feb 2004

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, hanya karena karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : ***"Status Dan Fungsi Tanah Bengkok Di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali"***, yang merupakan sebagai suatu syarat untuk mendapat derajat Strata 2 (S2) pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Penulisan usulan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta, pengolahan hasil penelitian sampai terselesainya penulisan tesis ini, tidak terlepas dari banyak bantuan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis dengan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Kepada Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc. Sebagai Rektor Universitas Diponegoro,
2. Kepada Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,
3. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH, Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan,
4. Bapak R. Suharto, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang juga selaku Dosen Penguji tesis,
5. Ibu Endang Sri Santi, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang penuh perhatian dan kesabaran membimbing penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini,

6. Bapak Sukirno, SH, Msi, dan Bapak A. Chulemi, SH Sebagai tim penguji tesis yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu untuk memberikan masukan untuk perbaikan karya ilmiah ini,
7. Para Guru Besar dan Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas diponegoro yang secara profesional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan,
8. Staf pengajaran pada program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah melayani penulis selama menempuh pendidikan,
9. Kepada Camat Selo yang banyak membantu penulis dalam penelitian,
10. Kepada Bapak Maryono selaku Kepala Desa Jeruk yang telah banyak membantu dan selalu mendampingi penulis di lapangan,
11. Kepada Kepala Desa Tlogolele dan Senden yang banyak membantu penulis di lapangan,
12. kepada sahabat sahabatku diperkuliahan, Saharjo, SH, MKN, yang telah sangat banyak membantu dalam penulisan tesis ini, Wahyu Fitri Wibowo, SH, Suwandy Chandra, SH, Sri Widyawati, SH, Emi Muriani, SH, Akti Cahyaningsih, SH, sobat karib sekaligus saudaraku Kel. Hargianto Jati Waluyo, kuucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas bantuan, dukungan, motivasi baik moril maupun materiil serta teman dalam suka dan duka selama penulis duduk di bangku perkuliahan S2, serta teman teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini juga penulis ucapkan dan haturkan sembah sujud kepada Ayahanda R. Soediono, SH (Alm) dan Ibunda Sri Hardjani yang telah memberikan doa restunya demi keberhasilan penulis. Demikian juga keluarga kakak kakak ku, kuucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Kupersembahkan secara khusus tesis ini dengan diiringi ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada istriku tercinta Diah Yuliasita Handayani, SH, yang telah memberikan motivasi yang tidak bosan-bosannya dan penuh

pengertian serta kasih sayang yang tulus, penuh kesabaran, ketabahan dan kesetiannya kepada penulis selama penulis mengenyam pendidikan. Tidak lupa juga kepada anak ku Monica Larasati Nugraha, yang aku cintai dan sayangi dengan tulus ikhlas.

Akhir kata, tesis ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis sangat menyadari akan adanya keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki, maka untuk kesempurnaan karya ilmiah ini kritik dan saran yang membangun penulis harapkan.

Semarang, 21 Oktober 2003

ttd

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 21 Oktober 2003



Junianta Agung Nugraha, SH

ABSTRAKSI

Status Dan Fungsi Tanah Bengkok Di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali

Oleh:

Junianta Agung Nugraha,SH.

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata. Dalam kegiatan pemerintahan di desa, tanah juga memiliki fungsi yang sangat penting, sebab tanah dalam hal ini tanah bengkok merupakan salah satu benda istimewa dalam kalangan masyarakat desa di Jawa, termasuk di Jawa Tengah. Tanah bengkok ini disamping menjadi kekayaan desa juga sebagai lambang kemakmuran desa yang bersangkutan. Tanah bengkok diberikan hak penggarapannya kepada pejabat desa, seperti kepala desa beserta perangkatnya sebagai gaji atas jabatannya. Keberadaan Tanah bengkok inilah yang membuat roda organisasi masyarakat desa efektif dan menjadi motifasi yang kuat bagi calon kepala desa untuk mengikuti pilkades. Melihat dari fungsi Tanah bengkok yang cukup strategis tersebut memerlukan pengelolaan yang serius.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1992 Tentang Perubahan status tanah bengkok menjadi tanah kas desa, serta pada Pasal 13 dari Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 141/377/Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor: 19 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa, pengelolaan Tanah Kas Desa supaya lebih produktif, berdaya guna dan berhasil guna dapat dilaksanakan dengan cara: Diusahakan sendiri oleh Pemerintah Desa; Bagi hasil dengan Pihak ketiga; Dikontrakkan atau disewakan; Cara-cara lain yang sesuai dengan kondisi Desa yang bersangkutan, hal ini mengarah pada pelaksanaan perubahan status tanah bengkok menjadi tanah kas desa.

Tanah bengkok Di Kecamatan Selo dalam kenyataannya masih dikuasai oleh Kepala Desa berikut juga oleh perangkat desa yang lain. Namun dalam laporan keuangannya tanah bengkok tersebut dimasukkan dalam Tanah kas desa yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan rutin desa maupun untuk pembangunan desa.

ABSTRACT
The Status and Function of Bengkok Land in Selo Sub district Boyolali Regency

By:
Juniata Agung Nugraha, SH.

Land is the gift of Great Unity God to the people of Indonesia, is one of main sources for the persistence of life and the nation livelihood forever in reaching as big as people's prosperity which is divided fairly and evenly distributed. In the governmental activity in villages, land also has a very important function, because the land, in this case is bengkok land, is one of special goods in village community of Java, includes in Central Java. This bengkok land instead of becoming a village treasure, also the symbol of village's prosperity. The cultivation rights of bengkok land is given to the village officer, such as the Head of Village along with his staffs as the salary on their position. The existence of bengkok land makes the organizational process of the village is effective and becomes a strong motivation for the candidate of the head of village to join with the head of village election (pilkades). Viewing the function of bengkok land that is quite strategic, it needs a serious organizing.

Using a juridical empiric approach did this research. The data collection and legal sources, both primary and secondary, the cases collected through observation, interview, and legal documents study, whereas the analysis technique was done in qualitative.

The Instruction of The Internal Affairs Minister Number 26 year 1992 about The Changing of Bengkok Land Status into The Village Treasury Land, and on Article 13 of The Decision of The Regent of Boyolali Number 19 year 2000 about The Income Sources of Village, the Cultivation of Village Treasury Land to be more productive, efficient, and effective, can be done by: self cultivation by Village Government; profit sharing with the third side; Rent or hired; the other ways that according to the condition of the village, this thing aim at the implementation of the changing of bengkok land status into the village treasury land.

The Bengkok land in Selo Subdistrict in fact is still under control of the Head of Village along with the other staffs. But in the financial statement, the bengkok land is included in the village treasury land that is later used to pay the routine activities of village and for the development of village.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan Tesis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan umum hak-hak penguasaan atas tanah.....	12
2.1.1. Pengertian hak penguasaan atas tanah	12
2.1.2. Fungsi Sosial hak-hak atas tanah	15
2.2. Arah Kebijakan Pembaharuan Hukum Agraria Nasional	16
2.3. Tinjauan Singkat Tanah Bengkok	20
2.3.1. Fungsi Tanah Bengkok sebelum berlakunya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1992 Tentang Perubahan status tanah bengkok dan yang sejenisnya	23
2.3.2. Fungsi Tanah Bengkok sesudah berlakunya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1992 Tentang Perubahan status tanah bengkok dan yang sejenisnya	24

2.3.2.1. Perubahan tanah Bengkok dan Tanah sejenisnya Menjadi Tanah kas Desa.....	24
2.3.2.2. Tujuan Perubahan Tanah Bengkok dan Tanah sejenisnya Menjadi Tanah kas Desa..	32
2.3.2.3. Pengelolaan Tanah Kas Desa	32
2.4. Hubungan Antarapenguasaan, Fungsi Sosial Dengan Tanah Bengkok	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan	39
3.2. Spesifikasi Penelitian	40
3.3. Lokasi Penelitian	40
3.4. Populasi dan sampel	40
3.5. Jenis dan Sumber Data	41
3.6. Teknik Pengumpulan Data	46
3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	47
3.7.1. Teknik Pengolahan Data	47
3.7.2. Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	50
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Boyolali	50
4.1.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Selo.....	52
4.1.1.1.1. Desa Jeruk	52
4.1.1.1.2. Desa Tlogolele.....	56
4.1.1.1.3. Desa Senden	58
4.1.2. Kebijakan Umum Kabupaten Boyolali Tentang Pemanfaatan Tanah Bengkok	59
4.1.2.1. Pengadaan Pengelolaan Pengembangan Penggunaan Dan Penggantian Tanah Kas Desa.....	63
4.1.2.1.1. Pengadaan Tanah Kas Desa.....	63
4.1.2.1.2. Pengembangan Tanah Kas Desa	65
4.1.2.1.3. Penggunaan dan Penggantian Tanah Kas Desa	66

4.1.2.2. Pengelolaan Tanah Kas Desa	74
4.2. Pembahasan	81
4.2.1. Keberadaan Tanah Bengkok di Wilayah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali	81
4.2.2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Bengkok di Wilayah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali	88
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	93
5.2. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	51
Tabel 4.2.....	54
Tabel 4.3.....	55
Tabel 4.4.....	57
Tabel 4.5.....	59
Tabel 4.6.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan landasan politik hukum agraria Indonesia, yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian sebagai pelaksana dari ketentuan diatas dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, bahwa hak menguasai dari negara tersebut memberi wewenang untuk:¹

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 229-230.

Hukum tanah nasional kita dalam pelaksanaanya selama ini, disamping terbukti mampu memberi dukungan pada kegiatan pembangunan disegala bidang yang memerlukan penguasaan dan penggunaan tanah, juga menunjukkan kelemahan dalam rumusan isi dan kelengkapan pengaturannya. Kelemahan tersebut selama era orde baru, yang menyelenggarakan pembangunan yang berdasarkan kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan, pada kenyataannya memberikan peluang pelaksanaan berdasarkan tafsiran yang menyimpang dari asas dan tujuan ketentuan yang bersangkutan, dengan segala akibatnya yang kita rasakan dewasa ini.²

Pelaksanaan Hukum Tanah Nasional selama orde baru sering kali dirasakan tidak menjamin perlindungan, bahkan menimbulkan rasa diperlakukan tidak adil bagi rakyat yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan ataupun yang berdalih untuk pembangunan.

Padahal Hukum Tanah Nasional jelas memuat rumusan asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang memberikan perlindungan bagi siapapun yang menguasai tanah secara sah terhadap gangguan dari pihak manapun, termasuk gangguan dari

² Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2002, hal. i

pihak penguasa sekalipun, bilamana gangguan itu tidak ada dasar hukumnya.³

Sebagai perwujudan sifat negara hukum yang berasaskan Pancasila, Khususnya Sila kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Hukum Tanah Nasional jelas melindungi hak-hak asasi manusia, sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyatakan, bahwa "sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi air ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri, oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur".

Hukum Tanah Nasional akan tetap merupakan hukum tanah Indonesia yang tunggal, tersusun berdasarkan alam pemikiran hukum adat mengenai hubungan hukum antara masyarakat hukum adat tertentu dengan tanah ulayatnya. Alam pemikiran hukum adat tersebut mengandung konsepsi hukum adat mengenai pertanahan yang telah diangkat menjadi konsepsi Hukum Tanah Nasional, yang dirumuskan sebagai: *komunalistik-religius* yang

³ *Ibid.* hal. 9

memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama karunia Tuhan Yang Maha Esa oleh para warga negara secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.⁴

Hubungan hukum yang *komunalistik-religius* dalam alam pemikiran hukum adat itu yang dikenal dalam perundang-undangan sebagai hak ulayat, oleh Hukum Tanah Nasional diangkat pada tingkat nasional menjadi hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan semua tanah di seluruh wilayah negara sebagai tanah bersama, yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan nasional dan masyarakat dewasa ini dan masa mendatang. Hubungan hukum itu yang dalam Hukum Tanah Nasional disebut hak bangsa.⁵

Disebut hubungan *komunalistik* untuk menunjukan hakikat hubungan hukum bangsa Indonesia dengan semua tanah diseluruh wilayah negara sebagai tanah bersama. Sifat religius menunjukkan keyakinan dan pengakuan, bahwa tanah bersama tersebut adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa.⁶

⁴ *Ibid*, hal 30

⁵ *Loc., Cit.*,

⁶ *Ibid.*, hal 31

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata. Maka tanah adalah untuk diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan itu penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya perlu diatur, agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, terutama golongan petani, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.

Begitu juga dalam kegiatan pemerintahan di desa, tanah memiliki fungsi yang sangat penting, sebab tanah dalam hal ini tanah bengkok merupakan salah satu benda istimewa dalam kalangan masyarakat desa di Jawa, termasuk di Jawa Tengah. Tanah bengkok ini disamping menjadi kekayaan desa juga sebagai lambang kemakmuran desa yang bersangkutan.

Tanah bengkok diberikan hak penggarapannya kepada pejabat desa, seperti kepala desa beserta perangkatnya sebagai gaji atas jabatannya. Keberadaan Tanah bengkok inilah yang membuat roda organisasi masyarakat desa efektif dan menjadi motifasi yang kuat bagi calon kepala desa untuk mengikuti pilkades. Melihat dari fungsi Tanah bengkok yang cukup strategis tersebut memerlukan pengelolaan yang serius.

Sejak berlakunya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 Tentang Perubahan Status Tanah Bengkok Dan Yang Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa, pengelolaan dan pengawasan tanah bengkok masuk menjadi tanah kas desa, akibat hukum dari perubahan tersebut, tanah kas desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa, yang termasuk juga Pendapatan desa tersebut dari pemandian umum yang diurus oleh desa, pasar desa, obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh desa, bangunan desa dan lain-lain kekayaan milik desa, yang hasilnya dipergunakan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan pengawasan penggunaannya dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Tetapi berdasarkan penelitian awal di Kabupaten Boyolali khususnya di Kecamatan Selo, tentang pemberlakuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 Tentang Perubahan Status Tanah Bengkok Dan Yang Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa, belum bisa berjalan efektif. Hal ini bisa diketahui masih dikelolanya tanah-tanah bengkok tersebut oleh personil Kepala Desa dan perangkatnya, selanjutnya sebagai upaya penertiban dan pendayagunaan tanah-tanah bengkok menurut ketentuan tanah bondo desa dan Tanah bengkok pamong desa dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan.

Belum lagi bila hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang memberikan otonomi penuh kepada Pemerintah kabupaten/Kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk mencari sumber pendapatan, sudah barang tentu asset Tanah bengkok yang ada di wilayah pemerintahannya menjadi suatu hal yang penting dan menarik. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada umumnya dan untuk peningkatan pendapatan desa pada khususnya.

Dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kenyataan-kenyataan hukum tersebut.

1.2. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah keberadaan tanah bengkok setelah berlakunya INMENDAGRI No. 26 Tahun 1992 di wilayah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali ?
2. Mengapa pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali masih dikuasai oleh personil Kepala Desa dan perangkatnya ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggali, mengungkapkan dan mengkaji tentang keberadaan tanah bengkok di wilayah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali,
2. Ingin mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali masih dikuasai oleh personil Kepala Desa dan perangkatnya.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun praktisi, yaitu :

- a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran teoritis dalam rangka pengembangan hukum Agraria dalam kaitannya dengan tanah-tanah bondu desa dan Bengkok.
- b. Secara praktis harapan terhadap hasil penelitian ini ditujukan ke arah yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, maupun orang-orang yang berkepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah bondu desa dan Bengkok, sehingga dapat menyiapkan langkah guna mengantisipasi masalah yang mungkin timbul akibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah demikian itu.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang: Latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang prinsip penguasaan dan penggunaan hak atas tanah, konsepsi-konsepsi hukum tentang hak atas tanah, jenis-jenis yang diberikan kepada subyek hak.

Bab III Metode penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, Populasi dan sampel, Jenis dan sumber data, Instrumen penelitian, Teknik Analisa Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan dalam bab ini akan diuraikan tentang Gambaran umum kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah bondu desa dan Bengkok serta dampak

pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah bondo desa dan
Bengkok

Bab V Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang
telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai
rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam
penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN UMUM HAK-HAK PENGUASAAN ATAS TANAH

2.1.1. PENGERTIAN HAK PENGUASAAN ATAS TANAH

Hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional adalah hak-hak yang masing-masing berisikan kewenangan, tugas/kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan bidang tanah yang dihaki. Apa yang boleh, wajib ataupun dilarang untuk diperbuat itulah yang membedakan hak penguasaan atas tanah yang satu dengan yang lain.

Ada yang merupakan hubungan perdata, misalnya Hak Milik atas tanah (Pasal 20 UUPA). Ada yang merupakan hubungan hukum publik, misalnya lembaga Menguasai dari Negara (Pasal 2 UUPA).

Berdasarkan konsepsi yang bersumber utama pada hukum adat, dan dilengkapi lembaga-lembaga hukum dari sumber lain sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum

Tanah Nasional tetap disusun dalam tata susunan berjenjang sebagai berikut:⁷

- a. Hak bangsa, yang merupakan hak penguasaan tertinggi dan meliputi semua tanah dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama;
- b. Hak menguasai dari negara, merupakan hak penguasaan atas tanah sebagai penugasan pelaksanaan hak bangsa yang merupakan hak publik (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945) Dengan rincian kewenangan mengatur, menentukan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam Pasal 2 tersebut oleh UUPA diberikan interpretasi otentik mengenai hak menguasai negara yang dimaksudkan oleh UUD 1945, sebagai hubungan hukum yang bersifat publik semata-mata. Dengan demikian tidak akan ada lagi tafsiran lain mengenai pengertian dikuasai dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut.
- c. Hak ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, yang merupakan hak penguasaan atas tanah bersama masyarakat-masyarakat hukum adat tertentu (Pasal 3 UUPA).

⁷ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2002, hal. 40-42

- d. Hak-hak perorangan yang memberikan kewenangan untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan dan/atau mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang tanah tertentu, berupa:
1. Hak-hak atas tanah, berupa hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut Hasil Hutan, Hal-hal lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA;
 2. Hak atas tanah wakaf, yang merupakan hak penguasaan atas sebidang tanah tertentu bekas hak milik, yang oleh pemiliknya dipisahkan dari harta kekayaannya dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau untuk kepentingan umum lainnya (PP Nomor: 28 Tahun 1977)
- e. Hak Tanggungan sebagai satu-satunya hak jaminan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberikan kewenangan kepada kreditor tertentu untuk dijual lelang atas sebidang

tanah tertentu yang dijadikan jaminan suatu piutang (Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996).

2.1.2. FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH

Hak atas tanah yang dimiliki seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Namun ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.⁸

⁸ *Ibid.* hal. 46

Sebagaimana halnya dalam konsepsi hukum adat penguasaan tanah itu mengandung amanat untuk diusahakan dan dimanfaatkan. Membiarkan tanah tersebut dalam keadaan tidak diusahakan berarti menyalahi aturan itu. Pasal 27, 34 dan 40, menyatakan bahwa tanah tidak boleh ditelantarkan. Menurut konsepsi hukum tanah nasional hak-hak atas tanah bukan hanya berisikan wewenang, melainkan sekaligus juga kewajiban untuk memakai, mengusahakan dan memanfaatkannya. Juga menurut konsepsi ini hak-hak perorangan bersumber pada hak bersama (yaitu hak bangsa), dan mengandung unsur kemasyarakatan.

2.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA NASIONAL

Ketetapan MPR RI Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, memberikan penjelasan berkaitan dengan sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi air ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri, oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi

mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Maka sekarang diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik.

Pembaharuan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut, dan angkasa dilakukan optimal, adil dan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Proses ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
3. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
4. Menyejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
5. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
6. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatannya dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;

7. Memelihara berkelanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
8. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi ekologi sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
9. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
10. Mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keaneka ragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
11. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
12. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi,

kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

2.3. TINJAUAN SINGKAT TANAH BENGGOK

Sebelum mengulas lebih jauh tentang tanah bengkok pada khususnya, dapat diawali membahas terlebih dahulu tentang beberapa macam tanah milik adat yaitu :⁹

1. Tanah milik desa adat misalnya desa sebagai persekutuan hukum membeli tanah untuk pasar, balai desa, yang hasilnya dimasukkan kedalam kekayaan desa, yang pajaknya dipikul oleh desa adat itu.
2. Tanah bengkok yaitu tanah yang dibeli oleh adat itu sendiri guna diberikan kepada perangkat desa pengurus desa yang bersangkutan.

Kepala persekutuan atau pembesar desa lain mempunyai hak atas tanah pertanian yang diberikan oleh persekutuan untuk memelihara keluarganya (tanah bengkok). Ia mempunyai hak atas penghasilan tanah itu, ia mempunyai hak mengeyam hasil tanah itu karena jabatannya. Hak ini lazimnya disebut hak seorang pejabat atas sebidang tanah Pemerintah kolonial dahulu menamakan hak ini "*ambtelijk profitrecht*".¹⁰

⁹ S. Poerwopranata, *Bantuan Tentang Tanah Adat*, Astana Buku Abadi Semarang, 1993, hal. 17.

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 205

Hak demikian ini dimiliki para pejabat baik semasa masih aktif bekerja maupun setelah dipensiun untuk selama memangku jabatannya atau selama hidupnya (selama pensiun) mengenyam penghasilan dari tanah/sawah itu. Tanah/sawah jabatan ini disebut "*sawah carik*", "*sawah kalungguhan*".

Tanah-tanah yang dimiliki para pejabat setelah pensiun ditemukan di kabupaten Ciamis, Kuningan, Majalengka dan Cirebon dan di daerah-daerah itu disebutnya "*tanah kahormatan*", "*sawah pensiun*".

Tanah/sawah-sawah jabatan seperti "*tanah bengkok*" atau "*sawah kalungguhan*" dijumpai juga di tanah Batak yang disebut "*sabana bolak*", di Sulawesi Selatan yang disebut "*galung arajang*", di Ambon yang dinamakan "*dusun dati*" raja, di Bali yang dinamakan bukti. Sesuai ketentuan-ketentuan Konversi Pasal VI Undang-Undang Pokok Agraria menjadi "*hak pakai*" Pasal 41 (1) Undang-Undang Pokok Agraria tersebut.

Di Minangkabau suatu keluarga mempunyai hak milik atas sawah pusakanya, sedangkan anggota keluarga yang bersangkutan mempunyai "*hak pakai*" ataupun "*ganggam bauntuik*" atas tanah itu.

penguasaan tanah, maka tidak lepas dari subyek dan obyek yang harus diakui dan pihak yang mengakui. Pengakuan terhadap subyek dan obyek hak atas tanah ulayat tidak lepas dari *political will* pemerintah yang berkuasa, meskipun Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa ;

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Pernyataan diatas diartikan bahwa UUD 1945 mengakui keberadaan kesatuan dari masyarakat hukum adat yang bersumber dari sistem budaya berbagai kelompok masyarakat yang tercakup dalam teritorial negara Indonesia. Pengakuan ini tidak hanya terbatas pada aspek eksistensi lembaganya saja, tetapi juga aspek struktural, mekanisme, peraturan-peraturannya berkaitan erat dengan berbagai hak dan kewajiban yang terkandung dalam sistem kelembagaan tersebut.

2.3.1. FUNGSI TANAH BENGKOK SEBELUM DIKELUARKAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN STATUS TANAH BENGKOK DAN YANG SEJENISNYA MENJADI TANAH KAS DESA

Tanah bengkok dan yang sejenisnya selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala desa dan Perangkat Desanya. Tanah Bengkok adalah tanah desa yang pada saat dikelola dan menjadi penghasilan langsung bagi aparat Pemerintah desa. Kepala persekutuan atau pembesar desa lain mempunyai hak atas tanah pertanian yang diberikan oleh persekutuan untuk memelihara keluarganya (tanah bengkok). Ia mempunyai hak atas penghasilan tanah itu, ia mempunyai hak mengeyam hasil tanah itu karena jabatannya.

Hak mengeyam hasil tanah (*sawah carik*", "*sawah kalungguhan*"), karena jabatannya.. demikian ini dimiliki para pejabat baik semasa masih aktif bekerja maupun setelah dipensiun untuk selama memangku jabatannya atau selama hidupnya (selama pensiun) mengenyam penghasilan dari tanah/sawah itu..

2.3.2. FUNGSI TANAH BENGKOK SESUDAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN STATUS TANAH BENGKOK DAN YANG SEJENISNYA MENJADI TANAH KAS DESA

2.3.2.1. PERUBAHAN TANAH BENGKOK DAN TANAH SEJENISNYA MENJADI TANAH KAS DESA

Dalam Lampiran I Pengertian, Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 Tentang Perubahan Status tanah Bengkok dan Yang Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa, menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan desa, maka pada dasarnya desa harus mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (desa harus mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri) dalam arti desa harus mampu membiyai kegiatan rutin dan pembangunan desanya.

Sehubungan dengan itu maka sumber pendapatan desa merupakan masalah yang penting dan mendesak untuk segera mendapatkan penyelesaian secara tuntas yaitu berupa:

1. Pengalihan sumber-sumber pendapatan desa, bagi desa-desa yang belum mempunyai sumber pendapatan;

2. Peningkatan sumber-sumber pendapatan desa, bagi desa-desa yang sudah mempunyai sumber pendapatan tetapi pemanfaatannya belum mencapai harapan.

Di dalam Lampiran I Pengertian, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 Tentang Perubahan Status tanah Bengkok dan Yang Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa, dijelaskan juga bahwa dalam kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa:

1. sebagian besar desa-desa diseluruh Indonesia belum mempunyai sumber pendapatan desa yang jelas;
2. Pungutan di tingkat desa belum dapat dilakukan karena belum adanya pengaturan di dalam peraturan daerah Tingkat I mengenai jenis-jenis pungutan-pungutan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
3. Penyerahan kepada Desa sebagian hasil pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah belum mendapatkan pengaturan di dalam peraturan daerah, baik Peraturan Daerah Tingkat I maupun Daerah Tk. II;
4. Pengetahuan dan kemampuan aparat pemerintahan desa untuk mengali dan meningkatkan sumber-sumber pendapat desa masih terbatas.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Jenis-jenis pendapatan desa sangat penting, oleh karena itu tanah merupakan salah satu sumber pendapatan desa, yaitu:

- a. Pengadaan tanah kas desa bagi desa-desa yang belum memiliki sumber pendapatan desa, merupakan suatu langkah yang tepat dan perlu ditempuh dalam usaha-usaha yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa yang bersangkutan;
- b. Pemanfaatan tanah-tanah desa yang telah dimiliki baik berupa bengkok, titisara, panggonan sebagai tanah kas desa perlu diarahkan kepada usaha mengali sumber-sumber pendapatan desa.

Dalam hal pengadaan sumber pendapatan desa yang berasal dari tanah sulit diperoleh karena keterbatasannya. Maka dapat dilakukan usaha-usaha dalam bentuk:

1. Peningkatan penggalan sumber pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi masyarakat;

2. Peningkatan jenis-jenis pungutan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku;
3. peningkatan pemanfaatan proyek prasarana yang dibangun dari bantuan pembangunan desa;
4. Usaha-usaha lainnya;
 - 4.1. penanaman pohon peneduh di pinggir jalan desa dan atau jalan yang dalam pengawasan desa, dengan tanamanan yang produktif dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.2. Penitipan tanaman pada tanah-tanah masyarakat dengan sistim bagi hasil;
 - 4.3. pemanfaatan hasil dari gerakan penghijauan;
 - 4.4. Penitipan bibit ternak pada masyarakat maupun bibit ikan dengan bagi hasil;
 - 4.5. Pemanfaatan bangunan desa untuk hiburan dan pertunjukan;

4.6. Pemanfaatan lapangan olah raga dengan berbagai kegiatan yang memungkinkan memperoleh hasil untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1982 tentang kedudukan dan kedudukan keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, akan tergantung kepada kemampuan keuangan desa itu sendiri yang tercermin dalam anggaran penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:3 Tahun 1982, Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 1982 ini tergantung pula pada tersedia atau tidaknya sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 1982 dan Nomor 2 Tahun 1982.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 1982 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 1982, mengenai sumber-sumber pendapatan Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 140/4732/PUOD tanggal 23 Desember 1986 tentang Usaha-usaha dalam Peningkatan sumber pendapatan Desa yang mengatur antara lain:

1. sumber pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa;
2. Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan asli Desa sendiri ditetapkan dengan Keputusan desa, sedangkan mengenai besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber pendapatan Desa yang berasal dari sebagian pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I;
3. Sumber pendapatan yang ada di Desa yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor: 5

Tahun 1979 merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan sebagian dari hasil sumber pendapatan di maksud kepada Pemerintah desa, yang besarnya ditentukan dalam Peraturan daerah tingkat I;

4. Sumber pendapatan asli Desa yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 merupakan sumber pendapatan bagi Desa yang bersangkutan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu pengembangannya agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya;
5. Sumber pendapatan Desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala desa dan Perangkat Desanya ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD);

Tahun 1979 merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan sebagian dari hasil sumber pendapatan di maksud kepada Pemerintah desa, yang besarnya ditentukan dalam Peraturan daerah tingkat I;

4. Sumber pendapatan asli Desa yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 merupakan sumber pendapatan bagi Desa yang bersangkutan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu pengembangannya agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya;
5. Sumber pendapatan Desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala desa dan Perangkat Desanya ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD);

6. Sumber-sumber pendapatan Desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis dari Desa-desanya yang statusnya berubah menjadi kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten) melalui APBD Tingkat II (Kabupaten) yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di tingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I;
7. Jenis dan bentuk pungutan Desa, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

2.3.2.2. TUJUAN PERUBAHAN TANAH BENGKOK DAN TANAH SEJENISNYA MENJADI TANAH KAS DESA

Perubahan status Tanah Bengkok menjadi tanah kas Desa bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga Desa semakin mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Tanah bengkok yang merupakan salah satu kekayaan desa yang saat ini dikelola dan merupakan pendapatan langsung bagi aparat Desa akan lebih efektif apabila dikelola Pemerintah Desa melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) sehingga dapat memberikan penghasilan kepada Pemerintah Desa.

2.3.2.3. PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 140/4732/ PUOD tanggal 23 Desember 1986 tentang Usaha-usaha dalam Peningkatan

sumber pendapatan Desa, proses penetapan pengelolaan Tanah kas Desa dimaksudkan dilaksanakan dengan cara lelang di depan umum dan dipimpin langsung oleh Camat yang membawahi Desa tersebut dengan membentuk panitia sewa/lelang yang keanggotaannya meliputi:

1. Pembina/ Pengawas : Camat
2. Ketua merangkap anggota: Kepala Desa/
Pejabat Kepala
Desa;
3. Sekrs merangkap anggota: Sekretaris Desa;
4. Bend merangkap anggota : Bendahara Desa;
5. Anggota : Ketua Bidang
Pemerintahan
pada LMD (BPD);
6. Anggota : Ketua Bidang
Pembangunan
LMD(BPD);
7. Anggota : Ketua bidang
Kemasyarakatan
pada LMD
(BPD)dan Tokoh/
Pemuka
masyarakat
lainnya.

Persyaratan Penyewa/Pelelang adalah sebagai berikut:

1. Penduduk setempat kecuali bila tanah itu disewakan kepada Proyek tebu Rakyat Intensifikasi (TRI);
2. Penawar dengan nilai tertinggi dari penawaran lainnya;
3. Telah membayar uang muka sedikit-sedikitnya 25 %, sedang sisanya paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan berikutnya telah dilunasi;
4. Masa lelang Tanah Kas Desa berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran;
5. Hasil lelang Tanah Kas Desa tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa dan dikelola dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kekayaan Desa.

2.4. HUBUNGAN ANTARA PENGUASAAN TANAH, FUNGSI SOSIAL DENGAN TANAH BENGKOK.

Dalam suatu persekutuan seorang Kepala persekutuan atau pembesar desa lain mempunyai hak atas tanah pertanian yang diberikan oleh persekutuan untuk memelihara keluarganya, tanah tersebut lazim disebut tanah bengkok. Kepala persekutuan atau pembesar desa tersebut mempunyai hak atas penghasilan tanah itu, mereka mempunyai hak menikmati hasil tanah itu karena jabatannya. Hak ini lazimnya disebut hak seorang pejabat atas sebidang tanah Pemerintah kolonial dahulu menamakan hak ini "*ambtelijk profitrecht*".

Tanah adat adalah yang berada di bawah kekuasaan masyarakat hukum adat, yang tunduk pada ketentuan hukum adat dan bukan milik perorangan, tetapi milik kaum, suku atau desa. Dalam hal ini, tanah adat merupakan tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, yang mengandung arti bahwa tanah berada dalam kekuasaan persekutuan hukum adat berdasarkan atas asas kebersamaan yang dikenal dengan hak ulayat. Hukum adat yang juga merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya, juga merupakan suatu permasalahan yang selalu dihadapi bangsa dan negara kita, khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional.

Selama ini terdapat dua kecenderungan yang kuat dan kontradiktif mengenai eksistensi hukum adat dalam pembentukan hukum nasional. Ada sementara pihak yang menginginkan secara utuh hukum adat itu dengan segala unsur-unsur tradisional dalam bentuk aslinya dan di lain pihak justru berkeinginan untuk menghapuskan hukum adat.

Selanjutnya terhadap kecenderungan yang lain. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan sebagai berikut :¹²

" Pekerjaan tersebut akan sia-sia belaka, oleh karena hukum adat telah terlembaga dengan kokohnya, kecuali dari pada itu, maka hukum adat telah menjiwai warga-warga masyarakat, serta senantiasa berkembang terus. Suatu penyangkalan terhadap eksistensi dan esensi hukum adat, akan menimbulkan masalah besar, oleh karena semakin menjauhnya cita-cita dari kalangan hukum dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, serta dalam kehidupan sehari-hari ".

Hak ulayat ini merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Untuk dapat memanfaatkan atau memungut hasil dari tanah tersebut, beserta segala sesuatu yang ada di atasnya. Untuk melangsungkan hidupnya, yang timbul dari hubungan lahiriah, batiniah dan turun

¹² Soejono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1983, hal. 325.

temurun dari nenek moyang kegenerasi sekarang untuk diteruskan pula pada generasi yang akan datang.

Hak ulayat telah dijabarkan dalam Pasal 3 undang-Undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960. Pengakuan terhadap penguasaan tanah, maka tidak lepas dari subyek dan obyek yang harus diakui dan pihak yang mengakui. Pengakuan terhadap subyek dan obyek hak atas tanah ulayat tidak lepas dari *political will* pemerintah yang berkuasa, meskipun Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa ;

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Pernyataan di atas diartikan bahwa UUD 1945 mengakui keberadaan kesatuan dari masyarakat hukum adat yang bersumber dari sistem budaya berbagai kelompok masyarakat yang tercakup dalam teritorial negara Indonesia. Pengakuan ini tidak hanya terbatas pada aspek eksistensi lembaganya saja, tetapi juga aspek struktural, mekanisme, peraturan-peraturannya berkaitan erat dengan berbagai hak dan kewajiban yang terkandung dalam sistem kelembagaan tersebut.

Hak atas tanah yang dimiliki seseorang, begitu pula dengan hak dari suatu persekutuan yang penguasaannya pada Kepala Desa tersebut, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penggunaan tanah bengkok tersebut harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Namun ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan dalam arti kepentingan dari Kepala Desa akan terdesak oleh kepentingan umum (masyarakat desa).

Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan (masyarakat desa). Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *pendekatan yuridis-empiris*. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang penguasaan dan pemanfaatan tanah-tanah bengkok.

Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.¹³ Lebih jauh penelitian ini berusaha untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

3.3. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah.

3.4. POPULASI DAN SAMPLE

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Desa di Wilayah Kecamatan Selo sejumlah 10 (sepuluh) desa antara lain Desa Telogo Lele, Desa Jrahah, desa Klakah, Desa Lencoh, Desa Samiran, Desa Suro Teleng, Desa Selo, Desa Tarubatang, Desa Senden dan Desa Jeruk.

¹³ Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian sosial suatu tehnik penelitian bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hal. 63

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *non random sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun yang menjadi pengambilan sampel dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) desa yaitu Desa Telogolele, Desa Jeruk dan Desa Senden dari setiap desa tersebut akan diambil 3 (tiga) perangkat desa antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun berikut juga tokoh masyarakat di ketiga desa tersebut. Selain mereka terdapat juga beberapa responden yang lain yaitu: Kabag Pemerintahan desa dan Kabag Hukum Kabupaten Boyolali dan Camat Selo.

3.5. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁴

¹⁴ Soeryono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa: norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan informan, yaitu para Kepala Desa, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali dan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dan para pejabat instansi yang terkait dengan masalah tersebut sebagai informan.

Sedangkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, yaitu meliputi :

1. Undang-Undang dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan desa;
4. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang pokok Otonomi daerah;
5. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan kedudukan keuangan kepala desa, sekretaris desa dan kepala dusun;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 tahun 1988
Tentang Prosedur penetapan Produk-produk hukum di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992
Tentang Perubahan Status tanah Bengkok dan Yang
Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1985
Tentang Larangan Perubahan fungsi Tanah Bengkok,
Taman Kota, Kebun Binatang dan Lapangan Olah Raga;
12. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor:
143/4697/PUOD Tanggal 9 Desember 1989 Tentang
Pembinaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran
Keungan Desa (APPKD), usaha-usaha peningkatan Desa
dan Kelurahan;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 140/4732/
PUOD tanggal 23 Desember 1986 tentang Usaha-usaha
dalam Peningkatan sumber pendapatan Desa;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan
Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;

15. Surat Edaran Gubernur Kepala daerah Jawa Tengah
Nomor: 143/30743 Tanggal 5 November 1988 tentang
Tanah bengkok untuk kepala desa dari ABRI dan PNS;
16. Surat Edaran Gubernur Kepala daerah Jawa Tengah
Nomor: 143/00118 tanggal 4 januari 1986 tentang
Inventarisasi Tanah-tanah bondo desa;
17. Surat Edaran Gubernur Kepala daerah Jawa Tengah
Nomor: 143/22927 Tanggal 5 Agustus 1986 tentang
Larangan perubahan fungsi tanah Bengkok, Taman Kota,
Kebun Binatang dan Lapangan Olahraga;
18. Surat Edaran Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor: 143/2304/1985 dan 143/00557119/1992
tentang Juklak Mutasi tanah Bondo Desa dan tanah eks
bengkok yang desanya menjadi kelurahan.

Untuk data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder;
adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan
hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu:

1. Hukum Pertanahan,
2. Hukum Adat yang berkaitan dengan tanah bengkok.

3.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.¹⁵

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tak struktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

- b. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap tanah Bondo Desa dan tanah eks bengkok di desa-desa wilayah kecamatan selo Kabupaten Boyolali.

¹⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9

3.7. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

3.7.1. PENGOLAHAN DATA

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:¹⁶

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan;
- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden;
- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis, mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membanding-bandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain dan mengelompokkannya dan

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

mengklasifikasikan data-data tersebut kedalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

7.2. ANALISIS DATA

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷

Pengertian di analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 12

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

¹⁸ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hal. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, terletak antara $110^{\circ} 22^{\circ}$ - $110^{\circ} 50^{\circ}$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 36^{\circ}$ - $7^{\circ} 71^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75-1500 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Boyolali dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang.

Tabel 4.1. Luas Tanah Bengkok Dan Kas Desa (Ha) Menurut Jenisnya Di Kabupaten Boyolali Tahun 2002

No	Kecamatan	Bengkok		Kas Desa	
		Sawah	Lahan Kering	Sawah	Lahan Kering
1	Selo	7.0	183.7	-	110.6
2	Ampel	55.0	354.1	34.1	169.9
3	Cepogo	28.8	288.3	8.9	163.4
4	Musuk	-	309.3	-	223.3
5	Boyolali	31.0	51.0	43.6	42.0
6	Mojosongo	78.8	126.9	29.1	46.1
7	Teras	157.9	-	128.9	-
8	Sawit	125.4	-	77.2	10.0
9	Banyudono	163.3	-	124.9	6.1
10	Sambi	275.5	9.4	103.7	15.6
11	Ngemplak	184.0	5.3	94.5	12.8
12	Nogosari	218.5	-	86.9	25.2
13	Simo	198.7	184.4	62.8	45.1
14	Karanggede	209.8	0.9	78.4	8.4
15	Klego	204.8	-	29.7	62.6
16	Andong	250.1	-	-	91.4
17	Kemusu	80.2	2.7	21.1	21.6
18	Wonosegoro	23.5	50.0	90.0	50.0
19	Juwangi	49.0	53.0	32.0	28.1
Jumlah: 2002		2341.6	1619.0	1045.8	1132.2
2001		2334.6	1486.6	1041.2	1221.0
2000		2397.2	1518.9	1130.0	1237.6

Sumber Data Sekunder: Kab. Boyolali Dalam Angka 2002

4.1.1.1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SELO

Kecamatan Selo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Boyolali yang terdiri dari 10 (sepuluh) desa antara lain Senden, Tlogolele, Jrakah, Jeruk, Selo, Klakah, Lencoh, Samiran, Suroteleng, Tarubatang, dengan jumlah penduduk sejumlah 27.890 jiwa.

Keadaan geografis Kecamatan Selo adalah berupa perbukitan, yang jarak antara ibukota Kabupaten adalah 20 Km. Suhu berkisar antara 17⁰-25⁰.

4.1.1.1.1. DESA JERUK

Gambaran umum potensi yang dimiliki oleh Desa Jeruk dapat dilihat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Jeruk Tahun 2002 antara lain meliputi:

- a. Luas wilayah : 762,85 Ha.
- b. Batas wilayah
 - Utara : Desa Seboto, Ampel
 - Timur : Desa Kembang Kuning, Cempogo
 - Selatan : Desa Senden
 - Barat : Hutan Gunung Merbabu.
- c. Ketinggian dari permukaan laut: 800-1.200 Dpl.

- d. Luas tanah bengkok perangkat : ± 15 Ha
- e. Luas tanah kas : ± 1 Ha
- f. Jumlah Penduduk – Laki-laki : 1.247 orang
- g. Jumlah Kepala Keluarga : 610 KK
- h. Mata Pencarian Penduduk : Mayoritas petani
- i. Jumlah anggota BPD : 11 orang
- j. Jumlah Perangkat : 8 orang.

Dari laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Jeruk Tahun 2002 dapat disimpulkan bahwa pos Pendapatan Asli Desa sebagai berikut: tanah bengkok dan tanah yang sejenis telah dimasukan menjadi tanah kas desa, yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah).

Tabel 4.2. Penghasilan Tiap-Tiap Perangkat Desa

NO	NAMA PERANGKAT	PENGHASILAN/TAHUN
1	Kepala Desa	Rp. 4.000.000,00
2	Sekretaris Desa	Rp. 2.500.000,00
3	Kepala Urusan	Rp. 1.700.000,00
4	Kepala Dusun	Rp. 175.000,00
Jumlah		Rp. 8.375.000,00

Sumber Data sekunder: laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Jeruk Tahun 2002

Jika dibaca dari laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Jeruk Tahun 2002 tersebut penerimaan dari tanah kas desa ini dimasukan dalam pendapatan asli desa yang kemudian akan dipergunakan untuk biaya dari pengeluaran rutin desa, tetapi kenyataannya di lapangan berlainan tanah bengkok tidak dikelola oleh Desa melainkan dikelola langsung oleh perangkat desa tersebut.

Tabel 4.3. Daftar Perangkat Desa Beserta Tanah Lungguh

NO	NAMA DESA	NO DESA	NAMA PERANGKAT DESA	SURAT KEPUTUSAN			TEMPAT TGL LAHIR		PDDK	PEKR ASAL
				TGL	NOMOR	TMT	Ls Lg			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	JERUK	3309012010	MARYONO (KADES)	30/4/1998	141/05/1998	30/4/1998	7,095 Ha	Bojolali, 29-2-1968	D3	TANI
2			SUYITNO (SEKDES)	15/2/2002	141/06/2002	15/2/2002	1,6 Ha	Bojolali, 11-3-1970	SLTA	SWASTA
3			HARSO SUMARTO (KADUS)	10/1/1984	141/27/1984	10/1/1984	1,6 Ha	Bojolali, 10-5-1946	SD	SWASTA
4			PARNO (KADUS)	8/2/2002	141/04/2002	8/2/2002	0,7 Ha	Bojolali, 5-2-1970	SD	SWASTA
5			TRIJO KO (KADUS)	9/2/2002	141/05/2002	9/2/2002	0,7 Ha	Bojolali, 5-4-1972	SLTP	SWASTA
6			SUMARNO (KADUS)	20/3/1993	141/14/1993	20/3/1993	0,8 Ha	Bojolali, 4-11-1969	SLTA	SWASTA
7			PRIYONO (KAUR)	20/11/1997	141/14/1997	20/11/1997	1,5 Ha	Bojolali, 1-9-1975	SLTP	SWASTA
8			YANTO (KAUR)	29/06/2002	141/09/2002	29/06/2002	0,7 Ha	Bojolali, 7-5-1968	SLTA	SWASTA

Sumber Data Sekunder Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Jeruk

4.1.1.1.2. DESA TLOGOLELE

Wilayah Desa Tlogolele seluas 585.3960, Ha, yang mempunyai batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Klakah
- Sebelah Selatan: Desa Sengi
- Sebelah Barat : Desa Sengi
- Sebelah Timur : Hutan/Gunung Merapi

Jumlah perangkat Desa Tlogolele adalah sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari: Kepala Urusan yang berjumlah: 2 (dua) orang dan Kepala Dusun yang berjumlah 4 (empat) orang.

Tanah Kas desa di Desa Tlogolele, adalah Tanah Bengkok dengan luas : 15,8615 Ha. Sumber pendapatan yang berasal dari hasil Tanah Kas Desa ini sejumlah Rp. 4.728.000,00 (empatjuta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).¹⁹

¹⁹ laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tlogolele Tahun 2002

Jumlah penduduk Desa Tlogolele laki-laki 1172
 (seribuseratus tujuh puluh dua) jiwa, perempuan 1210
 (seribu duaratus sepuluh) jiwa.²⁰

**Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Desa Tlogolele Berdasarkan
Tingkat Pendidikan**

NO	PENDUDUK	
	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Taman Kanak-Kanak	38
2	Sekolah Dasar	595
3	SMP/SLTP	86
4	SMA/SLTA	59
5	Akademi/D-1s/d D-3	3
6	Sarjana (S-1s/d S-3)	-
JUMLAH		781

Sumber Data sekunder: Data Monografi Desa Tlogolele sampai dengan
Agustus 2003

²⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tlogolele tanggal 19 Agustus 2003

4.1.1.1.3. DESA SENDEN

Wilayah Desa Senden adalah seluas: 351,1511

Ha., dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Jeruk
- Sebelah selatan : Desa Tarubatang
- Sebelah Barat : Desa Merbabu
- Sebelah Timur : Wilayah Kec. Cepogo.

Tanah bengkok luas: 16. 3125 Ha. Penghasilan dari tanah bengkok sebesar Rp. 9.471.000,- (sembilanjuta empatratustujuh puluh saturibu).²¹

Jumlah perangkat desa Senden, Kepala urusan 4 (empat) orang, Kepala Dusun/ Lingkungan 2 (dua) orang.

²¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Senden tanggal 19 Agustus 2003

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Desa Senden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDUDUK	
	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Taman Kanak-Kanak	61
2	Sekolah Dasar	1228
3	SMP/SLTP	139
4	SMA/SLTA	61
5	Akademi/D-1s/d D-3	9
6	Sarjana (S-1s/d S-3)	9
JUMLAH		1507

Sumber Data sekunder: Data Monografi Desa Senden sampai dengan Agustus 2003

4.1.2. KEBIJAKAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEMANFAATAN TANAH BENGKOK

Kebijakan pertanahan sebagai pelaksanaan UUPA lebih berorientasi pada pemerataan, keadilan, kesejahteraan masyarakat banyak dan berwawasan pada pengembangan otomatisasi urusan pertanahan. Perubahan dalam bidang pertanahan pada masa pemerintah reformasi ini ditandai dengan dikeluarkan Tap MPR Nomor: IX/MPR/2001, di

dalamnya ditegaskan arah kebijakan pembaruan agraria meliputi:

Pertama, melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor.

Kedua, melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.

Ketiga, menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.

Keempat, menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Seiring dengan pembaharuan agraria perlu dilakukan program penguatan hak rakyat atas tanah dan pemberdayaannya program ini harus sinergi dengan melibatkan semua instansi yang terkait. Tujuannya agar tanah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan cara memberdayakan petani melalui penguasaan hak atas tanah.

Langkah yang harus ditempuh adalah redistribusi tanah dengan pemberian hak milik atas tanah (termasuk sertifikat tanah) konsolidasi tanah dan kemitraan dengan penguasa atau secara mandiri oleh petani.

Sejalan dengan pembaharuan agraria ini, Pemerintah Kabupaten Boyolali, membuat kebijakan-kebijakan yang bertumpu pada arah kebijakan agraria nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Tap MPR Nomor: IX/MPR/2001. Hal ini bisa dilihat dari Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 141/377/Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor: 19 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa.

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa kekayaan Desa terdiri dari:

- a. Tanah Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Obyek Rekreasi Desa;
- e. Pemandian Umum Desa;
- f. Tempat Pemancingan Desa;
- g. Kekayaan Lain yang berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku menjadi kekayaan Desa;

Kekayaan Desa yang berasal dari tanah Desa sebagaimana di atas bersumber dari:

- a. Tanah Kas Desa/Tanah Kas Sampir;
- b. Tanah bekas Pituas;
- c. Tanah Tanah Sawah Pajak Lungguh (SPL)/Tanah Darat Pajak Lungguh (DPL);
- d. Tanah Bengkok/Lungguh;
- e. Tanah Kuburan yang dikelola Desa;
- f. Tanah Pangonan yang dikelola Desa;

- g. Tanah-tanah lain yang dikuasai oleh Pemerintah Desa baik yang sudah bersertifikat maupun belum.

4.1.2.1. PENGADAAN, PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, PENGGUNAAN DAN PENGANTIAN TANAH KAS DESA

4.1.2.1.1. PENGADAAN TANAH KAS DESA

Pengadaan tanah Desa dapat dilakukan dengan:

- a. Memanfaatkan Tanah Negara, Tanah ulayat dan lain-lain;
- b. Pembelian;
- c. Hibah atau penyerahan dari warga masyarakat atau badan-badan usaha kepada Pemerintah Desa;
- d. Cara-cara lain yang san.

Bentuk dan Jenis Tanah Desa dapat berupa:

- a. Sawah;
- b. Tegalan/ladang;

- c. Kebun;
- d. Tambak;
- e. Jenis Tanah Kas Desa lainnya.

Status kepemilikan Tanah Desa adalah merupakan kekayaan desa yang harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pengadaan Tanah Desa dibiayai dari:

- a. Bantuan APBD;
- b. Bantuan APBD Propinsi;
- c. Bantuan APBD Kabupaten;
- d. APBD Desa yang bersangkutan;
- e. Sumbangan pihak lain yang sah.

Lokasi Tanah Desa pada dasarnya berlokasi di wilayah Desa yang bersangkutan dan apabila di wilayah desa yang bersangkutan tidak dimungkinkan, dapat berlokasi di wilayah Desa lainnya dalam satu kecamatan atau diluar

kecamatan yang berbatasan dengan desa yang bersangkutan dalam wilayah satu kabupaten.

4.1.2.1.3. PENGEMBANGAN TANAH KAS DESA

Untuk mendapatkan hasil yang optimal perlu dilakukan upaya pengembangan terhadap Tanah Desa melalui:

- a. Penambahan Luas tanah yang ada;
- b. Mengembangkan usaha baru;
- c. Upaya lain sesuai dengan kondisi Desa yang bersangkutan.

Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan berkewajiban memfasilitasi pembinaan, pengawasan terhadap pengadaan, pengelolaan dan pengembangan Tanah Kas Desa, Guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat dibentuk Tim Pembinaan Tanah Desa.

4.1.2.1.3. PENGGUNAAN DAN PENGANTIAN TANAH DESA

Penggunaan tanah Desa yang diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dari Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 141/377/Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor: 19 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa dapat digunakan untuk:

- a. Pembangunan sarana pendidikan, sosial budaya dan keagamaan;
- b. Pembangunan sarana Kesehatan;
- c. Pembangunan sarana Pemerintahan;
- d. Pembangunan sarana Kantor/Instansi Pemerintahan;
- e. Lokasi Perumahan (Perumnas);
- f. Meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan tanah (tukar-menukar);

- g. Pembangunan proyek-proyek Pemerintah dan swasta (PLN, Telekomunikasi, Irigasi, Bendungan dan lain-lain) yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud diatas harus mendapatkan ganti berupa:

- a. Tanah senilai dengan Tanah Kas Desa yang dilepas/dimutaskan (tukar-menukar);
- b. Uang yang akan digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih dengan Tanah Desa yang dilepas/dimutasi, penggunaan uang ini harus dengan ijin tertulis dari Bupati oleh Kepala desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Untuk kelancaran mencari tanah pengganti yang senilai dengan Tanah Desa yang dilepas perlu dibentuk:

- a. Panitia Pengadaan Tanah Penganti Tanah Desa;
- b. Panitia Peneliti dan Pengendali untuk Penganti Tanah Desa.

Panitia Pengadaan Tanah Penganti Tanah Desa, ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan:

- a. Penasehat : Camat
- b. Ketua : Kepala Desa
- c. Sekretaris : Sekretaris Desa
- d. Bendahara : Bendaharawan Desa
- e. Anggota :

- Kepala Cabang Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan
Kecamatan;

Kasi Pemerintahan Kecamatan;

Kadus yang membawahi wilayah
Hukum calon Tanah yang akan
dibeli;

3 (tiga) orang dari unsur Badan
Perwakilan Desa;

1 (satu) orang Pemuka Masyarakat
yang menguasai dan mengelola di
bidang Pertanian.

Adapun tugas-tugas dari Panitia
Pengadaan Tanah Penganti Tanah Desa ini
adalah sebagai berikut:

1. Mengumumkan kepada masyarakat bahwa
Pemerintah Desa akan membeli Tanah
Penganti Tanah Desa yang
dilepas/mutasikan,
2. Mencari dan menyiapkan tanah di Desa
atau setidaknya dalam wilayah
Kecamatan yang bersangkutan atau diluar
wilayah Kecamatan lainnya yang
berbatasan dengan Desa yang
bersangkutan dalam wilayah Kabupaten
Boyolali;

3. Memberikan Laporan secara lengkap meliputi riwayat tanah, status tanah (bukti kepemilikan) dan harga tanah menurut harga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) maupun harga umum yang berlaku terhadap calon tanah milik penduduk yang akan dibeli kepada Badan Perwakilan Desa melalui Kepala Desa.

Untuk Panitia Peneliti dan Pengendali untuk Penganti Tanah Desa, ini ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penasehat : Bupati Boyolali
- b. Ketua : Sekretaris Daerah
Kabupaten Boyolali;
- c. Sekretaris : asisten Tata Praja Setda
Kabupaten Boyolali
- d. Bendahara : Staf Bagian Pertanahan
Desa Setda Kabupaten
Boyolali

e. Anggota :

- Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Boyolali;
- Kepala Dipertanhutbun Kabupaten Boyolali;
- Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Boyolali;
- Kabag. Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Boyolali;
- Kasubag Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Boyolali;

f. Staf administrasi :

- Seorang staf Badan Pertanahan Kabupaten Boyolali;
- Seorang staf Bagian Pemerintah Desa Setda Kabupaten Boyolali

Adapun tugas-tugas dari Panitia Peneliti dan Pengendali untuk Penganti Tanah Desa ini adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan Penelitian data administrasi, produktifitas dan nilai ekonomi terhadap calon tanah penganti yang telah dilaporkan oleh Kepala desa kepada Bupati;
2. Membuat Berita Acara hasil penelitian data administrasi dan keadaan tanah;
3. Melaporkan hasil penelitian data administrasi dan keadaan tanah yang memenuhi syarat dan disetujui sebagai calon Tanah Penganti kepada Bupati;
4. Bupati menyampaikan persetujuan tanah yang memenuhi syarat sebagai calon tanah penganti kepada Kepala Desa.

Tabel 4.6. Keadaan Pengelolaan Tanah Bengkok di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Tahun 2003

NO	DESA	JABATAN	LUAS TANAH	PENGELOLAAN TANAH	
				DIKERJAKAN SENDIRI	DISEWAKAN
1	JERUK	KEPALA DESA	7,095 Ha	-	7,095 Ha
		SEKRETARIS DESA	1,6 Ha	0,4 Ha	1,2 Ha
		KADUS I	1,6 Ha	1,6 Ha	-
		KADUS II	0,7 Ha	0,035 Ha	0,035 Ha
		KADUS III	0,7 Ha	0,7 Ha	-
		KADUS IV	0,8 Ha	0,4 Ha	0,4 Ha
		KAUR PEMERINTAHAN	1,5 Ha	-	1,5 Ha
		KAUR PEMBANGUNAN & KESRA	0,7 Ha	-	0,7 Ha
2	SENDEN	KEPALA DESA	6,84 Ha	-	6,84 Ha
		SEKRETARIS DESA	4,1 Ha	3,1 Ha	-
		KADUS I	1,3 Ha	0,650 Ha	-
		KADUS II	1,3 Ha	1,3 Ha	-
		KAUR PEMERINTAHAN	0,7 Ha	0,7 Ha	-
		KAUR KEUANGAN	0,7 Ha	-	0,7 Ha
		KAUR PEMBANGUNAN	0,8 Ha	-	0,8 Ha
		KAUR KESRA	0,8 Ha	-	0,8 Ha
3	TLOGOLELE	KEPALA DESA	5 Ha	-	5 Ha
		SEKRETARIS DESA	4,09 Ha	-	4,09 Ha
		KADUS I	1 Ha	-	1 Ha
		KADUS II	1 Ha	0,5 Ha	0,5 Ha
		KADUS III	1 Ha	1 Ha	-
		KADUS IV	1 Ha	1 Ha	-
		KAUR I	1 Ha	1 Ha	-
		KAUR II	1 Ha	1 Ha	-

Sumber Data Primer : Hasil Penelitian Lapangan

4.1.2.2. PENGELOLAAN TANAH DESA

1. Desa Jeruk

Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Jeruk untuk Kepala Desa disewakan kepada Pihak ketiga dan untuk perangkat desa yang lain ada yang dikelola sendiri dan ada yang tidak dikelola sendiri namun disewakan kepada pihak ketiga tanpa melalui proses pelelangan di muka umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lihat tabel 4.6.).²²

2. Desa Tlogolele

Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Tlogolele untuk Kepala Desa tidak dikelola sendiri secara aktif oleh Kepala Desa namun disewakan kepada pihak ketiga tanpa melalui proses pelelangan di muka umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk pengelolaan tanah bengkok perangkat desa yang lain ada yang dikelola dan ada juga yang

²² Hasil wawancara dengan Kepala Desa Jeruk tanggal 19 Agustus 2003

disewakan kepada pihak ketiga (lihat tabel 4.6.).²³

3. Desa Senden

Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Senden untuk Kepala Desa disewakan kepada Pihak ketiga dan untuk perangkat desa yang lain sebagian tidak dikelola sendiri namun disewakan kepada pihak ketiga tanpa melalui proses pelelangan di muka umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lihat tabel 4.6.).²⁴

Menurut Pasal 13 dari Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 141/377/Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor: 19 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa, pengelolaan Tanah Kas Desa supaya lebih produktif, berdaya guna dan berhasil guna dapat dilaksanakan dengan cara:

²³ Hasil wawancara dengan Kela Desa Tlogolele Tanggal 20 Agustus 2003

²⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Senden tanggal 19 Agustus 2003

- a. Diusahakan sendiri oleh Pemerintah Desa;
- b. Bagi hasil dengan Pihak ketiga;
- c. Dikontrakkan atau disewakan;
- d. Cara-cara lain yang sesuai dengan kondisi Desa yang bersangkutan.

Penetapan pengelolaan Tanah Kas Desa dengan cara dikontrakkan atau disewakan, harus dilaksanakan dengan cara lelang di depan umum oleh Panitia Lelang, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penasehat : Camat;
- b. Ketua Merangkap Anggota : Kepala Desa
- c. Skrtr merangkap Anggota : Sekertaris
Desa
- d. Bendh merangkap Anggota : Bendaharawan
Desa
- e. Anggota :

- Kasi Pemerintahan Kecamatan;

- Perangkat Desa (Kepala Urusan Pemerintahan);
- 3 (tiga) orang dari Badan Perwakilan Desa;
- Pemuka masyarakat yang menguasai dan mengelola di bidang Pertanian.

Hasil pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan dilampiri:

- a. Berita Acara pelaksanaan Lelang;
- b. Surat Perjanjian Sewa menyewa antara Kepala desa dengan pemenang lelang dan dalam perjanjian tersebut dimasukan kewajiban atas pajak tanah dan lain-lain beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penetapan penyewaan Tanah Kas Desa adalah sebagai berikut:

- a. Tanah kas Desa, Tanah Kas sampir, Tanah Bekas Pituas, Tanah Sawah Pajak Lungguh

(SPL) dan Tanah Darat Pajak Lungguh (DPL) yang akan disewakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa harus diumumkan kepada masyarakat setelah mendapat ijin Badan Perwakilan Desa.

- b. Prosedur penyewaan Tanah kas Desa, Tanah Kas sampir, Tanah Bekas Pituas, Tanah Sawah Pajak Lungguh (SPL) dan Tanah Darat Pajak Lungguh (DPL) tersebut ditempuh melalui pelelangan yang sebelumnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat umum.
- c. Tanah Kas Desa, Tanah Kas sampir, Tanah Bekas Pituas, Tanah Sawah Pajak Lungguh (SPL) dan Tanah Darat Pajak Lungguh (DPL) yang akan disewakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Sampai batas 2 (dua) tahun dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa;

2. Lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan persetujuan Camat;
3. Diatas 5 (lima) tahun dengan persetujuan Bupati;
4. Biaya Lelang setinggi-tingginya 5 (lima) persen yang dipergunakan untuk administrasi, Honorarium dan biaya Operasional Panitia Lelang, hasil lelang agar dibukukan dalam buku kas dan disimpan di Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya dan dalam pengeluaran uang oleh bendahara Desa harus diketahui bendahara desa.
5. Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disewakan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - Tidak boleh melebihi masa akhir jabatannya;

- Tanah Bengkok Kepala Desa yang akan disewakan sampai dengan 2 (dua) tahun terlebih dahulu harus dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disewakan lebih dari 2 (dua) maksimum 5 (lima) dengan persetujuan Camat setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa;

Pada kenyataannya untuk proses penetapan penyewaan juga tidak mengindahkan ketentuan tentang tatalaksana penyewaan tanah bengkok yang telah ditentukan dalam Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 141/377/Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali Nomor: 19 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa, pengelolaan Tanah Kas Desa supaya lebih produktif, berdaya guna dan berhasil guna. Karena dalam

kenyataannya masih ada dan masih dikuasai oleh Kepala Desa berikut juga oleh perangkat desa yang lain walaupun ada yang disewakan. Tetapi dalam laporan keuangan dari desa Jeruk, Desa Senden dan Tlogolele, tanah bengkok (tanah Lungguh) tersebut dimasukan dalam Tanah kas desa yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan rutin desa maupun untuk pembangunan desa.²⁴

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. KEBERADAAN TANAH BENGKOK DI WILAYAH KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI

Keberadaan tanah bengkok di Kabupaten Boyolali mempunyai konsepsi yang sama dengan konsepsi tanah bengkok di daerah lain, yang mana mempunyai kedudukan sebagai tanah milik adat, beberapa macam tanah milik adat dapat dibedakan menjadi:

1. Tanah milik desa adat misalnya desa sebagai persekutuan hukum membeli tanah untuk pasar, balai

²⁴ Wawancara dengan Camat Selo tanggal 24 September 2003

desa, yang hasilnya dimasukkan kedalam kekayaan desa, yang pajaknya dipikul oleh desa adat itu.

2. Tanah bengkok yaitu tanah yang dibeli oleh adat itu sendiri guna diberikan kepada perangkat desa pengurus desa yang bersangkutan.

Kepala desa dan perangkat Desa lain mempunyai hak atas tanah pertanian yang diberikan oleh persekutuan untuk memelihara keluarganya (tanah bengkok). Kepala desa dan perangkat Desa mempunyai hak atas penghasilan tanah itu, Kepala desa dan perangkat Desa mempunyai hak mengeyam hasil tanah itu karena jabatannya.

Hak ulayat telah dijabarkan dalam Pasal 3 undang-Undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960. Pengakuan terhadap penguasaan tanah, maka tidak lepas dari subyek dan obyek yang harus diakui dan pihak yang mengakui. Pengakuan terhadap subyek dan obyek hak atas tanah ulayat tidak lepas dari political will pemerintah yang berkuasa, meskipun Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa ;

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Pernyataan diatas diartikan bahwa UUD 1945 mengakui keberadaan kesatuan dari masyarakat hukum adat yang bersumber dari sistem budaya berbagai kelompok masyarakat yang tercakup dalam teritorial negara Indonesia. Pengakuan ini tidak hanya terbatas pada aspek eksistensi lembaganya saja, tetapi juga aspek struktural, mekanisme, peraturan-peraturannya berkaitan erat dengan berbagai hak dan kewajiban yang terkandung dalam sistem kelembagaan tersebut.

Tanah Bengkok di Kecamatan Selo pada khususnya diakui keberadaannya dan sangat berguna bagi suatu masyarakat pedesaan tertentu, hal ini bisa dicontohkan dengan adanya Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 141/377/ Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor: 19 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa, pengelolaan Tanah Kas Desa supaya lebih produktif, berdaya guna dan berhasil guna dengan pengadaan tanah Desa dapat dilakukan dengan:

1. Memanfaatkan Tanah Negara, Tanah ulayat dan lain-lain;
2. Pembelian;
3. Hibah atau penyerahan dari warga masyarakat atau badan-badan usaha kepada Pemerintah Desa;
4. Cara-cara lain yang sah.

Bentuk dan Jenis Tanah Desa dapat berupa:

- a. Sawah;
- b. Tegalan/ladang;
- c. Kebun;
- d. Tambak;
- e. Jenis Tanah Kas Desa lainnya.

Status pemilikan Tanah Desa adalah merupakan kekayaan desa yang harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pengadaan Tanah Desa dibiayai dari:

- a. Bantuan APBD;
- b. Bantuan APBD Propinsi;

- c. Bantuan APBD Kabupaten;
- d. APBD Desa yang bersangkutan;
- e. Sumbangan pihak lain yang sah.

Lokasi Tanah Desa pada dasarnya berlokasi di wilayah Desa yang bersangkutan dan apabila di wilayah desa yang bersangkutan tidak dimungkinkan, dapat berlokasi di wilayah Desa lainnya dalam satu kecamatan atau diluar kecamatan yang berbatasan dengan desa yang bersangkutan dalam wilayah satu kabupaten.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal perlu dilakukan upaya pengembangan terhadap Tanah Desa melalui:

- a. Penambahan Luas tanah yang ada;
- b. Mengembangkan usaha baru;
- c. Upaya lain sesuai dengan kondisi Desa yang bersangkutan.

Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan berkewajiban memfasilitasi pembinaan, pengawasan terhadap pengadaan, pengelolaan dan pengembangan Tanah Kas

Desa, Guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat dibentuk Tim Pembinaan Tanah Desa.

Penggunaan tanah Desa yang diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dari Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 141/377/Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor: 19 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa dapat digunakan untuk:

- a. Pembangunan sarana pendidikan, sosial budaya dan keagamaan;
- b. Pembangunan sarana Kesehatan;
- c. Pembangunan sarana Pemerintahan;
- d. Pembangunan sarana Kantor/Instansi Pemerintahan;
- e. Lokasi Perumahan (Perumnas);
- f. Meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan tanah (tukar-menukar);
- g. Pembangunan proyek-proyek Pemerintah dan swasta (PLN, Telekomunikasi, Irigasi, Bendungan dan lain-lain) yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud diatas harus mendapatkan ganti berupa:

- a. Tanah senilai dengan Tanah Kas Desa yang dilepas/dimutaskan (tukar-menukar);
- b. Uang yang akan digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih dengan Tanah Desa yang dilepas/dimutasi, penggunaan uang ini harus dengan ijin tertulis dari Bupati/oleh Kepala desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Untuk kelancaran mencari tanah pengganti yang senilai dengan Tanah Desa yang dilepas perlu dibentuk:

- a. Panitia Pengadaan Tanah Penganti Tanah Desa;
- b. Panitia Peneliti dan Pengendali untuk Penganti Tanah Desa.

Jadi eksistensi tanah bengkok di Kecamatan Selo masih diakui keberadaannya.

4.2.2. PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DI WILAYAH KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 1982 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 1982, mengenai sumber-sumber pendapatan Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 140/4732/PUOD tanggal 23 Desember 1986 tentang Usaha-usaha dalam Peningkatan sumber pendapatan Desa angka 5 yang mengatur antara lain:

“Sumber pendapatan Desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala desa dan Perangkat Desanya ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)”.

Lampiran I Pengertian, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 Tentang Perubahan Status tanah Bengkok dan Yang Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa, menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka pada dasarnya desa harus mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (desa harus mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri) dalam arti desa harus mampu membiyai kegiatan rutin dan pembangunan desanya.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 13 dari Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 141/377/Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor: 19 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa, pengelolaan Tanah Kas Desa supaya lebih produktif, berdaya guna dan berhasil guna dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Diusahakan sendiri oleh Pemerintah Desa;
- b. Bagi hasil dengan Pihak ketiga;
- c. Dikontrakkan atau disewakan;
- d. Cara-cara lain yang sesuai dengan kondisi Desa yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan formal dari keputusan dari Keputusan Bupati Boyolali ini sejalan dengan peraturan-peraturan diatasnya. Kenyataan dilapangan sesuai dengan hasil penelitian tanah bengkok di kabupaten Boyolali masih dikelola oleh personil- kepala desa dan perangkat desa lainnya, hal ini juga secara nyata disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati (No. 141/005 Tahun 1998) tentang pengangkatan Kepala Desa:

.....Kepala Desa sebagai dimaksud dalam di diktum Pertama Keputusan ini diberi penghasilan berupa Tanah bengkok seluas kolom 7 (tujuh) dengan kewajiban memikul beban yang berhubungan dengan tanah tersebut (PBB).....

Menurut Stufen Theori dari Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa peraturan-peraturan hukum positif disusun secara piramidaal (bertingkat-tingkat) dilihat dari atas yaitu grundnorm merupakan dasar dari segala kekuasaan dan merupakan legalitas hukum positif, yang selanjutnya disusun kedalam norma-norma yang lebih konkrit lagi dan begitu seterusnya sampai akhirnya didapat satu susunan norma-norma yang dapat dilaksanakan

Menurut Kelsen pada tiap tingkat tidak saja dilaksanakan norma-norma hukum, akan tetapi dalam mengkonkritisir norma-norma hukum dari satu peraturan yang lebih tinggi diciptakan pula norma-norma hukum baru dengan mengetrapkan norma-norma yang lebih tinggi pada suatu keadaan dan pada pihak pihak tertentu. Satu putusan dengan sekaligus melaksanakan dan menciptakan hukum. Pada tiap tingkat yang lebih rendah kebebasan untuk mencipta semakain kecil, akan tetapi kebebasan ini tak pernah berhenti sama sekali. Tiap putusan memuat satu tindakan mencipta, karena mengadakan pilihan antara kemungkinan-kemungkinan penafsiran yang dimungkinkan oleh satu

Undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang ada di atasnya.²⁵

Jadi dengan dasar Stufen teori tersebut pemanfaatan tanah bengkok di Kabupaten Boyolali terjadi penyimpangan pelaksanaan dari ketentuan yang berlaku. Dimana Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa dan Gaji dari Kepala Desa tersebut didasarkan pada kebiasaan yang timbul dari adanya tanah bengkok tersebut yang merupakan tanah gaji kepala desa yang keberadaannya turun temurun yang sangat bermanfaat bagi lahirnya motifasi yang besar bagi pencalonan kepala desa.

Juga pada kenyataannya untuk proses penetapan penyewaan juga tidak mengindahkan ketentuan tentang tatalaksana penyewaan tanah bengkok yang telah ditentukan dalam Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 141/377/Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor: 19 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa, pengelolaan Tanah Kas Desa supaya lebih produktif, berdaya guna dan berhasil guna. Karena dalam kenyataannya masih ada dan masih dikuasai oleh Kepala Desa berikut juga oleh perangkat desa yang lain walaupun ada yang disewakan. Namun dalam laporan keuangannya

²⁵ Sutikno, *Filsafat Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal 66

tanah bengkok tersebut dimasukan dalam Tanah kas desa yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan rutin desa maupun untuk pembangunan desa.²⁶

²⁶ Wawancara dengan Kabag Pemerintahan Desa tanggal 25 September 2003

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Tanah Bengkok diakui keberadaannya bagi suatu masyarakat pedesaan tertentu dan masih dimanfaatkan sebagai penghasilan langsung dari Kepala Desa atau perangkatnya, hal ini bisa dilihat dari ketentuan Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 141/377/Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor: 19 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa, pengelolaan Tanah Kas Desa supaya lebih produktif, berdaya guna dan berhasil guna, yang memberikan peluang untuk pengadaan, pengelolaan dan pengantian tanah bengkok bila tanah tersebut digunakan diperlukan untuk kepentingan umum.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 1982 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 1982, mengenai sumber-sumber pendapatan Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 140/4732/PUOD, tanggal 23 Desember 1986 tentang Usaha-usaha dalam Peningkatan sumber pendapatan Desa angka 5. Sejalan

dengan ketentuan tersebut, berikut juga Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1992 Tentang Perbuahan status tanah bengkok dan yang sejenisnya Pasal 13 dari Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 141/377/Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor: 19 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa, pengelolaan Tanah Kas Desa supaya lebih produktif, berdaya guna dan berhasil guna dapat dilaksanakan dengan cara:

1. Diusahakan sendiri oleh Pemerintah Desa;
2. Bagi hasil dengan Pihak ketiga;
3. Dikontrakkan atau disewakan;
4. Cara-cara lain yang sesuai dengan kondisi Desa yang bersangkutan.

Tanah bengkok Di Kecamatan Selo dalam kenyataannya masih ada dan masih dikuasai oleh Kepala Desa berikut juga oleh perangkat desa yang lain. Namun dalam laporan keuangannya tanah bengkok tersebut dimasukan dalam Tanah kas desa yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan rutin desa maupun untuk pembangunan desa. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya pemahaman bahwa tanah bengkok dari dulu merupakan penghasilan langsung dari Kepala Desa berikut juga oleh perangkat desa yang lain, hal ini bisa dilihat dalam Surat

Keputusan Camat Nomor: 141/14/97 Tentang pengangkatan perangkat Desa dalam wilayah Kecamatan Selo Kabupaten DATI II Boyolali berikut juga Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 141/005 tahun 1998 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten DATI II Boyolali.

5.2. SARAN

1. Sesuai dengan Pasal 13 dari Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 141/377/Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor: 19 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa, pengelolaan Tanah Kas Desa supaya lebih produktif, berdaya guna dan berhasil guna, hendaknya dikelola secara intensif oleh pemegang haknya guna lebih memberdayakan fungsi sosial hak atas tanah bengkok tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tullisan tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1982.

Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2002.

_____, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah dan Pembentukan Undang-Undang Pokok Hukum Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1999.

_____, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Bustami Rahman, *Nilai Kultural dan Diferensiasi Agraria di pedesaan Jawa (Kasus Desa Tamping Mojo di Jawa Timur)*, Disertasi-UGM, Yogyakarta, 1995.

Ferry J. Julianto, *Tanah Untuk Rakyat*, Pustaka Jaya, 2000.

Hermayulis, *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*, Desertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1982.



- _____. *Metode Pembuatan Kertas Kerja, atau Skripsi Ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian sosial suatu tehnik penelitian bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999
- Iman Sudiyat, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depatemen Kehakiman, Jakarta, 1982
- Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yokyakarta, 2001.
- Kartasapoetra, et.al. *Hukum Tanah jaminan UUPA bagi keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Konsorsium Pembaharuan Agraria, *Reformasi Agraria*, Konsorsium Pembaharuan Agraria dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Jakarta, 1997.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Cet. Ke 11, Bandung, 1999
- Munir Fuady, *Perspektif Hukum Agraria Konvensional*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996.
- Parlindungan, A.P., *Berakhirnya Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983.

_____, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cet. Ke. 2, 1988.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet. Ke 4, 1995.

Sutikno, *Filsafat Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976,

Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998

Soetomo, *Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak & Sertifikat*, Lembaga Penerbit Universitas Brawijaya, Malang, 1981

Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1995

Laporan Penelitian dan Jurnal

Analisis CSIS, Pemberdayaan Masyarakat Lapis Bawah, Tahun XXVI,
No. 1 Januari-Februari, 1997.

Priono Onny S. dan A.M.W. Pranaka (penyunting), *Pemberdayaan*
Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta, 1996

Kartini Soedjendro, *Konflik Pemanfaatan Tanah Eks Bengkok Di Kota*
Semarang, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Hukum Dan Konflik Di Dalam Masyarakat*,
Dalam *Majalah Masalah-Masalah Hukum* No. 5 Tahun 1994,
hal. 47-51.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang
Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang pokok Pemerintahan di
Daerah;

Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang pokok Otonomi
daerah;

Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Penggurusan dan Pengawasannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan kedudukan keuangan kepala desa, sekretaris desa dan kepala dusun;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 tahun 1988 Tentang Prosedur penetapan Produk-produk hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 65 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 Tentang Perubahan Status tanah Bengkok dan Yang Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1985 Tentang Larangan Perubahan fungsi Tanah Bengkok, Taman Kota, Kebun Binatang dan Lapangan Olah Raga;

Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor: 143/4697/PUOD Tanggal 9 Desember 1989 Tentang Pembinaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD), usaha-usaha peningkatan Desa dan Kelurahan;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 140/4732/ PUOD tanggal 23 Desember 1986 tentang Usaha-usaha dalam Peningkatan sumber pendapatan Desa;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;

Surat Edaran Gubernur Kepala daerah Jawa Tengah Nomor: 143/30743 Tanggal 5 November 1988 tentang Tanah bengkok untuk kepala desa dari ABRI dan PNS;

Surat Edaran Gubernur Kepala daerah Jawa Tengah Nomor: 143/00118 tanggal 4 januari 1986 tentang Inventarisasi Tanah-tanah bondo desa;

Surat Edaran Gubernur Kepala daerah Jawa Tengah Nomor:
143/22927 Tanggal 5 Agustus 1986 tentang Larangan
perubahan fungsi tanah Bengkok, Taman Kota, Kebun
Binatang dan Lapangan Olahraga;

Surat Edaran Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor:
143/2304/1985 dan 143/00557119/1992 tentang Juklak
Mutasi tanah Bondo Desa dan tanah eks bengkok yang
desanya menjadi kelurahan.